



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN
KOORDINASI HUKUM PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa terkait dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah, perlu dibentuk Panitia dan Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia dan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tahun 2023.
 2. melaksanakan kegiatan Bimtek
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE POTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023

- I. Pengarah : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Penanggungjawab : Plt. Kepala Biro Hukum
- III. Ketua : Plt. Kepala Bagian Perundang-undangan
- IV. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum
- V. Anggota : 1. Drs. Urbanus Wihiawari, M.Si
2. Aten Waine, SH
3. Darius Kogoya, SH
4. Apulus Wakerkwa, SH
5. Sulistyorini Ariwibowo, SE
6. Nicolaus Kegiye, S.STP
7. Rasminto Mallisa, S.STP
8. Daniel Sergius Paulus Inggesi
9. Ratih Puspa Dewi
10. Tuyan Adriaan Mote, SE
11. Doly Pigai
12. Friska Sitorus, S.Sos

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023

- I. Pengarah : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Penanggungjawab : Plt. Kepala Biro Hukum
- III. Ketua : Plt. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi
- IV. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum
- V. Anggota : 1. Plt. Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Plt. Asisten Administrasi Umum
4. Plt. Inspektur Provinsi Papua Tengah
5. Plt. Kepala BPPKAD
6. Plt. Kepala BAPPERIDA
7. Plt. Kepala Biro Organisasi
8. Danius Kogoya, SH
9. Aten Waine, SH
10. Apulus Wakerkwa, SH
11. Doly Pigai
12. Friska Sitorus, S.Sos

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Penanggungjawab : Plt. Kepala Biro Hukum
- III. Ketua : Plt. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi
- IV. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Otonomi Khusus
2. Danius Kogoya, SH
3. Aten Waine, SH
4. Apulus Wakerkwa, SH
5. Yulian Mulianto, SH
6. Friska Sitorus, S.Sos
7. Sari Yulinda, S.Sos
8. Inneke Kusumastuti, S.Kom
9. Rita Dessy Fauzian Ananda, ST
10. Alpius Muyapa, S.IP
11. Yuliana Sawo, S.Sos
12. Doly Pigai
- VI. NARASUMBER : 1. Makmur Marbun, SH
2. Menase Yoteni, SH, M.Si
3. Ramandhika S

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

TIM PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Penanggungjawab : Plt. Kepala Biro Hukum
- III. Ketua : Plt. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi
- IV. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum
- V. Anggota : 1. Danius Kogoya, SH
2. Aten Waine, SH
3. Apulus Wakerkwa, SH
4. Rita Saranga, SE
5. Inneke Kusumastuti, S.Kom
6. Drs. Teodolus Asmanto
7. Luis Tebay, SH
8. Wilus Ivano Bonai, SH
9. Thresia Lamawuran, S.Sos
10. Junior R Panjaitan, S.TrIP
11. Doly Pigai
12. Eko Budiyanto, SE

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN V KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Penanggungjawab : Plt. Kepala Biro Hukum
- III. Ketua : Plt. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi
- IV. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum
- V. Anggota :
 - 1. Hans Silvanus Andoi, SE
 - 2. Sihol P Tambunan, SH
 - 3. Darius Kogoya, SH
 - 4. Aten Waine, SH
 - 5. Apulus Wakerkwa, SH
 - 6. Doly Pigai
 - 7. Friska Sitorus, S.Sos
 - 8. Theresia K Mambruaru
 - 9. Jaqline Olivia Kirioma, S.AN
 - 10. Orthence Yomilena, S.Sos
 - 11. Derek Nawipa, S.Sos
 - 12. Kristianus Pekey, SH

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001